



KR-Antara/Yusuf Nugroho

SUNGAI DIPENUHI SAMPAH: Dua anak melintasi jembatan di atas Sungai Kesambi yang dipenuhi sampah di Desa Kesambi, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (12/1). Kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya menyebabkan sampah memenuhi sungai yang berpotensi menyebabkan banjir.

LAYANI 250 JUTA PERGERAKAN ORANG

Pemerintah Subsidi Kereta Api Rp 3,2 Triliun

JAKARTA (KR) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun lebih untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) dan Subsidi Kereta Api Perintis Tahun 2022. Rinciannya, untuk PSO Rp 3,051 triliun dan subsidi kereta api Rp 186,7 Miliar.

Kemenhub menugaskan PT KAI untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam rangka memberikan pelayanan kereta api yang selamat, aman, nyaman, sehat, dan terjangkau. "Ada dana Pemerintah sekitar Rp 3,2 triliun lebih, dititipkan kepada PT KAI untuk melayani sekitar 250 juta pergerakan orang. Kami akan mengawal agar kegiatan PSO dan subsidi perintis ini bisa dijalankan dengan baik," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (12/1).

Menhub mengatakan, pemberian alokasi anggaran tersebut telah melalui proses diskusi yang panjang dengan PT KAI dan dilakukan secara selektif, agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kita ingin

memberikan kemudahan, kepastian dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api. Untuk itu, unsur keselamatan dan pelayanan prima harus dipenuhi dengan baik," ujar Menhub.

Menhub mengapresiasi PT KAI yang terus konsisten melakukan perbaikan dan peningkatan layanan kepada para pengguna jasa kereta api. Menhub berharap ke depannya PT KAI terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik. "Ke depan, PT KAI mampu mengelola dana secara mandiri agar bisa tetap profit, tetapi juga memberikan pelayanan secara baik," tuturnya.

Pemerintah secara konsisten memberikan alokasi anggaran untuk PSO dan subsidi KA perintis. Dalam empat tahun terakhir, nilai kontrak anggaran PSO yaitu, tahun 2018 sebesar Rp 2,27 triliun, 2019 (Rp 2,321 triliun), 2020 (Rp 2,519 triliun), dan 2021 (Rp 3,448 triliun). Sedangkan, nilai kontrak subsidi KA perintis yaitu, 2018 (Rp 193,405 miliar), 2019 (Rp 183,960 miliar), 2020 (Rp 159,012 miliar), dan 2021 (Rp 211,706 miliar).

(Imd)-f

TERMASUK UNTUK KARANTINA

Biaya Umrah, Termurah Rp 32 Juta

JAKARTA (KR) - Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, biaya termurah perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19 ini mencapai Rp 32 juta.

"Karena angkanya menjadi lebih mahal yang awalnya Rp 20 juta, kita sekarang minimal Rp 32 juta," ujar Syam saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (12/1).

Syam mengatakan, angka itu termasuk di dalamnya biaya karantina di Arab Saudi maupun di Indonesia. Sementara biaya termahal dapat menyentuh sekitar Rp 45 juta hingga Rp 55 juta, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 internasional.

"Sekarang minimal Rp 32 juta dengan karantina baik di Arab Saudi maupun Indonesia, itu paling murah, mendapat hotel bintang 4 lokal," kata Syam.

Sapuhi akan memberangkatkan jemaah umrah pada 15 Januari. Syam menyebut sejumlah hal sudah disiapkan dan telah mengikuti aturan yang ada. Sejumlah persyaratan yang telah disiapkan seperti paspor, visa, hingga sertifikat vaksinasi.

Jemaah yang akan berangkat bakal menjalani karantina di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Calon jemaah umrah akan dicek status kesehatannya dan jika dinyatakan layak untuk berangkat, maka bisa melanjutkan menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Sesampainya di Saudi, jemaah umrah akan kembali menjalani

karantina di hotel yang telah dipesankan. Setelah menjalani karantina dan tes PCR-nya dinyatakan negatif, maka diperbolehkan untuk menjalani ibadah umrah.

Sebelumnya, Kementerian Agama mengingatkan operator Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mematuhi Kebijakan Satu Pintu (One Gate Policy) sebagai upaya untuk meminimalisasi potensi terjadinya penularan Covid-19.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Agama Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, Kebijakan Satu Pintu ini merupakan aturan sistem pemberangkatan jemaah secara terpusat yang telah ditetapkan Kemenag. Aturan ini mengatur seluruh jemaah umrah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dan menjalani karantina

di Jakarta.

Kebijakan ini juga mengatur tentang pemeriksaan kesehatan, tes PCR/swab, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian, hingga pengurusan dokumen lainnya secara terpusat.

"Intinya melindungi jemaah, memberikan proteksi dengan maksimal, serta memastikan jemaah dalam kondisi siap dengan dokumen yang valid dan terjaga," katanya.

Menurutnya, kebijakan ini harus menjadi perhatian bersama mengingat dalam perjalanan ibadah umrah, peran Kemenag ada pada fungsi fasilitasi dan koordinasi. Sementara untuk operator pelaksanaan menjadi tanggung jawab PPIU. "Umrah itu business to business, artinya jika dapat visa, bisa berangkat umrah," katanya. (Ant)-f

Stok Vaksin Booster Mencukupi

JAKARTA (KR) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, stok vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi booster mencukupi. Vaksinasi booster ini penting bagi seluruh rakyat Indonesia diberikan sebagai komitmen dari Pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman Covid-19 dan termasuk varian-varian barunya.

"Pemerintah sendiri alhamdulillah sudah memiliki vaksin yang cukup," ujar Menkes di Jakarta, Rabu (12/1). Dikatakan Menkes, stok vaksin tersebut antara lain berasal dari kontrak pengadaan vaksin tahun lalu yang akan dikirimkan di awal tahun ini maupun vaksin yang datang melalui kerja sama bilateral dan multilateral.

Sebelumnya Covax memberikan komitmen bantuan terhadap 20 persen dari populasi Indonesia, sekarang sudah dikonfirmasi akan ditingkatkan menjadi 30 persen dari populasi Indonesia. "Kira-kira setara vaksinasi untuk 27 juta orang atau kira-kira setara dengan 54 juta dosis vaksin gratis yang bisa diterima Pemerintah total dari tahun lalu dan tahun ini," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan vaksinasi booster yang dimulai 12 Januari 2022 diberikan secara gratis kepada masyarakat.

"Program vaksinasi booster ini akan dilakukan secara gratis untuk masyarakat Indonesia yang telah berusia 18 tahun ke atas dan sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau dua kali suntik minimal enam bulan yang lalu," terang Menkes. (Ati)-f

DETEKTOR VARIAN COVID-19 HASIL RISET BRIN

Telah Terbit, Izin Edar RT-LAMP

SERPONG (KR) - Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/3602/2021 menyebutkan, RT-LAMP termasuk dalam kategori tes molekuler Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) bersama-sama dengan Quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (QRT-PCR) dan Tes Cepat Molekuler (TCM), dengan akurasi yang sangat baik.

Peneliti Kimia Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tjandrawati Mozef sangat bersyukur dengan telah terbitnya izin edar RT-LAMP dari Kemenkes. "Dengan diterbitkannya izin edar reguler RT-LAMP hasil riset BRIN, maka kita memiliki alternatif baru untuk mendeteksi Covid-19. Apalagi di beberapa negara seperti Belanda dan Spanyol juga telah menetapkan RT-LAMP sebagai salah satu metode setara RT-PCR yang digunakan untuk mendeteksi Covid-19," ujar Tjandrawati Mozef di Jakarta, Rabu (12/1).

Dikatakan, perbedaan RT LAMP dengan RT-PCR adalah dalam proses amplifikasi gen target, reaksi RT-LAMP berlangsung secara isothermal atau suhu konstan sehingga tidak memerlukan alat thermocycler atau alat PCR.

Invensi RT-LAMP berupa paten terdaftar P00202110865 yang memiliki desain sistem menggunakan 2 gen target ORF dan gen N, 6 set primer, enzim reverse transcriptase, enzim polimerase; dengan sistem deteksi berbasis turbiditas. Metode temuan periset BRIN tersebut dikembangkan sejak Maret 2020 bersama mitra PT Biosains Medika Indonesia, yang saat itu akan melakukan komersialisasi produk. Kini RT-LAMP telah memiliki Nomor Izin Edar Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, yakni Kemenkes RI AKD 2030322XXXX. Izin edar produk dengan merek dagang Qi-LAMP-O ini berlaku sampai Januari 2027.

"Keunggulan RT-LAMP diban-

dingkan dengan RT-PCR ini selain tidak memerlukan alat deteksi PCR yang mahal, harga kitnya pun lebih murah," tambah Tjandrawati.

Tjandrawati menyampaikan, pada awal pandemi Covid-19, dirinya beserta tim berinisiatif untuk mengembangkan sistem alternatif untuk melakukan skrining dan deteksi RNA virus SARS-Cov-2. "Pada saat itu, kebutuhan untuk mendeteksi virus dengan menggunakan PCR. Sementara alat PCR yang ada di Indonesia sangat terbatas dan hanya terdapat di laboratorium besar. Selain itu, reagen yang digunakan untuk uji PCR merupakan impor," jelasnya.

Dikatakan, hingga saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir, varian-varian baru bermunculan, sehingga memotivasi BRIN untuk terus melakukan riset, berkontribusi dalam pengendalian pandemi, dan mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan tracing, testing dan treatment (3T). (Ati)-f

PEMBENTUKAN SATGAS DIDUKUNG

Cegah Kekerasan Seksual di Kampus

JAKARTA (KR) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengapresiasi langkah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang meminta Perguruan Tinggi di Indonesia segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus.

"Saya mengharapkan kampus di seluruh Indonesia dapat segera membentuk Satuan Tugas tersebut sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi," kata Menteri PPPA di Jakarta, Rabu (12/1).

Bintang mendukung upaya pembentukan Satgas ini sebagai percepatan terhadap implementasi Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Diharapkan, kampus sebagai lingkungan pendidikan tinggi menjadi tempat yang bersih dari segala tindak kekerasan seksual.

"Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang sangat keji dapat berdampak terhadap mental, fisik, dan merusak masa depan korban. Kita tidak bisa mentoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun," tegasnya.

Bintang menambahkan, kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat menurunkan kualitas pendidikan dan menjauhkan dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menteri PPPA menegaskan, pencegahan kekerasan seksual tidak hanya di lingkungan kampus tetapi harus menjadi aksi bersama oleh semua pihak mulai dari Pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, institusi pendidikan, lingkungan perkantoran, hingga setiap keluarga dan individu.

Bintang pun menekankan bahwa semua pihak harus menjadikan pencegahan sebagai hulu dalam melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual. Tak hanya pencegahan, ia menekankan bahwa penegakan hukum sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan dan menimbulkan efek jera. (Sim)-f

2022, Angkutan Udara Perintis Bertambah

JAKARTA (KR) - Program angkutan udara perintis pada tahun 2022 mulai beroperasi dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penyelenggara angkutan udara perintis dilayani 21 Koordinator Wilayah (Korwil) dengan jumlah rute penumpang sebanyak 244 rute penerbangan dan angkutan udara perintis kargo sebanyak 41 rute, serta satu rute subsidi angkutan udara kargo.

"Sebelumnya, pada tahun 2021 hanya dilayani 20 Korwil dengan jumlah rute penumpang sebanyak 208 rute penerbangan dan angkutan udara perintis kargo 38 rute, serta satu rute subsidi angkutan udara kargo," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto di Jakarta, Rabu (12/1).

Dijelaskan Novie, program angkutan udara perintis ini merupakan fokus Pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan mengatasi persoalan logistik di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan (3TP). "Dengan demikian, masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan logistik," ujarnya.

Penerbangan perdana angkutan udara perintis baik penumpang maupun kargo tahun 2022 saat ini telah dimulai di beberapa Korwil, seperti di Bandara Sumenep di Jawa Timur, Bandara Langgur di Maluku, Bandara Mozes Kilangin di Mimika Papua, Bandara Gunung Sitoli, Bandara Sibisa di Sumatera Utara, dan Bandara Andi Jemma di Luwu Utara Sulawesi Selatan. (Imd)-f

DITJEN BEA DAN CUKAI MUDAHKAN PROSEDUR

Taru Martani Targetkan Kenaikan Ekspor 30 Persen

YOGYA (KR) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memberikan kemudahan layanan bagi komoditas ekspor. Termasuk di antaranya produk cerutu dari Yogyakarta. Kemudahan tersebut diantaranya, layanan yang lebih cepat sehingga memudahkan pabrik memberikan kepastian waktu dalam menjalankan prosedur ekspor kepada pihak importir di luar negeri.

"Kemudahan dalam pengurusan dokumen, diharapkan mendorong peningkatan ekspor," ujar Kasie Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Khairuddin di sela proses penyegelan oleh Kantor Bea Cukai Yogyakarta untuk barang ekspor produk cerutu PT Taru Martani, Rabu (12/1). Barang tersebut akan dikirimkan ke Jerman melalui pelabuhan di Semarang.

Menurut Khairuddin, dengan penyegelan tersebut, maka produk beredar di pasar Indonesia, tetapi dikhususkan untuk dikirim ke luar

negeri (ekspor). Barang yang disegel tersebut dilengkapi dokumen yang menyatakan produk tersebut tidak dilengkapi cukai rokok karena ditujukan untuk ekspor.

Mengenai kecepatan layanan ini, tambah Khairuddin, memang sangat tergantung dokumen yang dipersyaratkan. Jika lengkap, selesai dengan sangat cepat. "Kecepatan layanan ini, membuat kita bisa memberikan kepastian waktu, proses ekspor kepada pembeli kita di luar negeri. Kita diuntungkan dengan kecepatan layanan ini," ungkap Kepala Divisi Pemasaran PT Taru Martani, Slamet.

Pihak Taru Martani sendiri sejauh ini telah mengirim produknya ke sejumlah negara, selain ke Jerman, juga Amerika Serikat, Jepang, Georgia, Taiwan, Lebanon dan Swiss. Total ekspor ke negara tersebut di tahun 2021 lalu sebesar 54.166 dolar AS, atau Rp 800 juta atau mendekati Rp 1 miliar. Sedangkan omzet total Taru Martani di tahun 2021, sebesar Rp 53,6 mi-

liar. "Kami menargetkan tahun 2022, ada peningkatan ekspor sebesar 30 persen," ujar Slamet.

Direktur PT Taru Martani, Drs Nur Achmad Affandi MBA mengemukakan, pihaknya terus berusaha memperbaiki kualitas dan memperluas jaringan pasar, sehingga bisa menambah lapangan

kerja dan lebih memperbesar devisa negara dan pendapatan negara melalui pajak dan cukai.

Di tahun 2021 Taru Martani telah dapat memberikan pendapatan negara sejumlah Rp 19,8 miliar terdiri dari cukai Rp 10,6 miliar, pajak Rp 3,8 miliar. PAD Rp 5,4 miliar. (Jon)-d



KR-Primaswolo Sudjono

Proses pemeriksaan produk Taru Martani yang akan disegel oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Yogya.